Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Agama (Studi Perkara di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung)

Oleh:

Nila Munana, Fitria Ni'matul Maula, Na'imin, Siti Zumrotun

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: nilamuna1m@gmail.com

Abstract

Disputes over joint property or gono-gini often occur in divorce and inheritance processes, causing prolonged conflict. This study focuses on the resolution of joint property disputes through non-litigation mediation facilitated by religious leaders in Ngadisepi Village, Gemawang District, Temanggung Regency. Mediation was chosen as an alternative method that is faster, more cost-effective, and more effective in reaching agreements than litigation. Religious leaders play an important role in strengthening mediation with an approach to religious values believed in by the local community. This study uses a descriptive-qualitative approach with data collected through observation and documentation. The results of the study indicate that a mediation approach involving religious leaders can provide a more emotionally and financially satisfying solution for the disputing parties. In addition, mediation helps reduce tension and accelerate conflict resolution, thereby increasing the satisfaction of all parties involved.

Keywords: Gono gini property, Mediation, Religious leaders.

A. Pendahuluan

Sengketa harta bersama telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Konflik ini sering kali timbul dalam konteks perceraian, pewarisan, atau pemisahan aset, yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan direktori putusan mahkamah agung indonesia Pada tahun 2023 terdapat 2316 kasus sengketa harta bersama ini menunjukkan bahwa persengkeetaan harta bersama ada sacara masif. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi alternatif yang lebih efektif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 dan 36 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan

¹ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 156, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 dinyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dan pada pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antar suami dan isteri tentang harta maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama.²

Jadi dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang dilihat kapan diperoleh, jika ada harta sebelum perkawinan meskipun dicari bersama-sama itu bukanlah harta bersama tapi jika harta itu dicari sesudah menikah maka itulah yang dikategorikan harta bersama³ kecuali hibah, waris, mahar dan hadiah.

Jika suami isteri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu mereka melakukan musyawarah sendiri maka harta bersama (gono-gini) sebenarnya dapat dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak yang bercerai. Didalam masyarakat masih ada yang merasa bahwa pembagian harta bersama (gono-gini) dengan cara bermusyawarah kedua belah pihak tidak sesuai atau salah satu pihak ada yang merasa di rugikan dan juga dapat menimbulkan keributan jika ada kesalahan dalam pembagian. Maka dapat di selesaikan dengan cara berperkara mengenai harta bersama (gono-gini) ini ke Pengadilan Agama maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴

Ada kalanya perkara harta bersama (gono-gini) berakhir di tahap mediasi. Mediasi itu sendiri berarti proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵ Ciri utama proses

² (Kompilasi Hukum Islam)

³ Veny Rizky Indahsari, Sugijono, and Emi Zulaika, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi," 2014, 1.

⁴ Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 78, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240>.

⁵ Reza Ahmad Zahid and Ahmad Badi, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 273.

mediasi itu sendiri adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Mediasi telah diakui sebagai metode yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama karena mediasi menawarkan proses yang sangat fleksibel, cepat, dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan secara emosional, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pengadilan.⁶ Perkembangan mediasi seiring dengan keinginan manusia yang lebih besar untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah. Namun, penerapan mediasi dalam konteks sengketa harta bersama masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai pendekatan yang relevan dalam proses mediasi. Pendekatan psikologis, ekonomis, dan filosofis, yang masing-masing memiliki kontribusi penting dalam penyelesaian sengketa, sering kali diterapkan secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang memadai. Pendekatan psikologis berfokus pada aspek emosional dan perilaku para pihak, membantu mereka untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih damai. Sementara itu, pendekatan ekonomis mengedepankan analisis biaya-manfaat untuk mencari solusi yang paling efisien secara finansial. Di sisi lain, pendekatan filosofis mempertimbangkan nilai-nilai etis dan moral yang mendasari penyelesaian sengketa, memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya adil secara legal tetapi juga adil secara moral.

Di dalam perma nomer 1 tahun 2016 pada pasal 26 berisikan bahwa mediasi dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Tokoh agama mempunyai pengaruh yang tidak kecil di masyarakat, mereka di pandang sebagai sosok manusia yang memiliki peran strategis dalam

⁶ Maisa, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu," *Journal Of Philosophy* 2, no. 2 (2021): 83.

perilaku kehidupan masyarakat.⁷ Status tokoh agama didapat bukan melalui pengangkatan formal sebagai pemimpin, melainkan karena ia mempunyai potensi, kemampuan dan kharismatik. Kedudukannya mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu golongan atau kelompok masyarakat.

Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan model mediasi yang mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut psikologis, ekonomis, dan filosofis dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Model ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan mediasi yang ada saat ini dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Dengan menggabungkan berbagai perspektif ini, diharapkan mediasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap kompleksitas sengketa harta bersama dan mampu menawarkan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti dari sisi perspektif normatif dan yuridis. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa model mediasi terintegrasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional dalam mengurangi waktu dan biaya penyelesaian sengketa serta meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik mediasi yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sehingga Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyoroti pentingnya mediasi sebagai metode alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dibandingkan dengan pendekatan litigasi konvensional dan bagaimana proses mediasi yang di bantu oleh tokoh agama sebagai mediator yang menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memberikan gambaran tentang permasalahan dalam perkawinan terkait harta gono gini dan peran tokoh agama setempat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi yang dilakukan secara langsung dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis naratif yakni Penelitian bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci.

⁷ Indi Asqia Az-zahra and Milhan, "Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah," *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 398.

B. Pembahasan

1. Tujuan Mediasi Sengketa Harta Bersama dengan Tokoh Agama

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif telah memperoleh tempat yang signifikan dalam sistem peradilan di berbagai negara termasuk Indonesia. Khususnya dalam sengketa harta bersama, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan manusiawi dibandingkan dengan litigasi. Dari perspektif psikologis bisa mengurangi stres dan ketegangan yang dialami oleh para pihak. Proses litigasi yang formal dan berlarut-larut sering kali menambah beban psikologis, sementara mediasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif cenderung mengurangi tekanan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mediasi merasa lebih didengar dan dihargai, yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis mereka.

Kesejahteraan psikologis yang dimiliki akan memberikan kemudahan seseorang untuk menghadapi masalah mental, sehingga memiliki rasa penerimaan pada diri sendiri maupun orang lain, memiliki tujuan hidup serta dapat menguasai keadaan lingkungan dengan baik. Kesejahteraan psikologis yang dimiliki seseorang akan mengantarkan pada kehidupan yang dapat menikmati kesehatan fisik maupun mental yang menciptakan perasaan bahagia dalam menjalani kehidupan. Kesejahteraan psikologi dapat ditingkatkan melalui berbagai intervensi yang salah satunya adalah dengan cara mediasi.⁸

Dalam litigasi biaya pengacara merupakan salah satu komponen terbesar. Pengacara biasanya menagih biaya berdasarkan jam kerja, yang dapat bertambah secara signifikan seiring berjalannya waktu. Mediasi, yang lebih singkat dan terfokus, biasanya mengurangi waktu yang dibutuhkan pengacara, sehingga mengurangi biaya secara keseluruhan. Proses litigasi melibatkan berbagai biaya pengadilan, termasuk biaya pendaftaran perkara, biaya sidang, dan biaya administratif lainnya.⁹ Mediasi biasanya hanya memerlukan satu atau beberapa sesi pertemuan, yang biayanya jauh lebih rendah. Waktu adalah faktor ekonomi

⁸ Muhammad Alvin Saputra et al., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama The Urgency of Mediation in the Settlement of Joint Property Disputes," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 794.

⁹ Aisyah Agraida, "Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini Melalui Proses Mediasi (Studi Penetapan Nomor 436 / Pdt . G / 2016 / PA . Bji)," *IJBL: Indonesia Of Journal Business Law* 1, no. 2 (2022): 65, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1874>.

yang penting dalam penyelesaian sengketa. Litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan mediasi biasanya dapat diselesaikan dalam hitungan minggu atau bulan. Penghematan waktu ini tidak hanya mengurangi biaya langsung tetapi juga mengurangi kehilangan produktivitas dan potensi pendapatan yang hilang akibat keterlibatan dalam proses hukum yang berkepanjangan.

Mediasi secara filosofis, berakar pada prinsip keadilan restoratif yang menekankan perbaikan hubungan dan penyelesaian konflik melalui dialog dan partisipasi aktif para pihak. Berbeda dengan keadilan retributif yang fokus pada penghukuman, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi.¹⁰ Prinsip ini sangat relevan dalam konteks sengketa harta bersama, di mana hubungan interpersonal seringkali menjadi faktor yang penting. dalam menjembatani sebuah konflik yang berkepentingan peran mediasi disinilah pentingnya untuk dapat mengeluarkan situasi dan kondisi pihak-pihak yang bersangkutan sengketa.

Mediasi mengedepankan perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Dalam sengketa harta bersama, tujuan utama bukan hanya pembagian harta yang adil tetapi juga pemulihan hubungan antar pihak yang seringkali terjalin lama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan dialog dan pemulihan harmoni sosial.¹¹ Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Mereka memiliki kontrol lebih besar atas hasil yang dicapai, dibandingkan dengan proses litigasi di mana keputusan final berada di tangan hakim. Ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi individu dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Mediasi mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan harmonis, yang merupakan nilai penting dalam banyak budaya, termasuk Indonesia. Filosofi harmoni sosial ini mendukung stabilitas dan kohesi sosial, yang penting dalam masyarakat yang beragam.

Mediasi dalam sengketa harta bersama dari perspektif filosofis mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, otonomi individu, dan harmoni

¹⁰ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 134, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

¹¹ Maisa, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu," 83.

sosial. Integrasi mediasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan damai. Namun, tantangan seperti kesadaran masyarakat, kualitas mediator, keterbatasan infrastruktur, dan budaya hukum perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan mediasi.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Oleh Tokoh Agama Setempat

Sengketa harta bersama yang terjadi antara Pihak A (perempuan) dan Pihak B (laki-laki) melibatkan dua jenis aset, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dipersengketakan berupa tanah dan bangunan rumah, sementara benda bergerak yang menjadi objek sengketa adalah sebuah mobil. Permasalahan utama dalam sengketa ini muncul karena adanya percampuran antara harta bawaan dan harta bersama. Tanah tempat rumah dibangun merupakan harta bawaan Pihak B, sementara rumah yang berdiri di atasnya merupakan harta bersama yang dibangun dengan kontribusi dari kedua belah pihak. Pihak A berperan dalam pembangunan rumah dengan membeli beberapa bahan bangunan, seperti genting, lantai keramik, serta seluruh material kayu yang digunakan untuk pintu dan jendela. Adapun mobil yang menjadi sengketa dibeli sepenuhnya oleh Pihak A, tetapi dalam proses pembeliannya, nama kepemilikan yang terdaftar adalah Pihak B, yang juga bertanggung jawab atas perawatan kendaraan tersebut.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa ini, kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian harta bersama. Pihak A menginginkan 50% dari nilai rumah sebagai bagian haknya, sedangkan Pihak B merasa keberatan dan hanya bersedia memberikan 30%. Setelah melalui beberapa tahap mediasi, Pihak A bersedia menurunkan tuntutan menjadi 40%, sementara Pihak B tetap bersikeras pada angka 30%. Mediator kemudian berupaya mencari jalan tengah dengan menawarkan solusi bahwa Pihak A mendapatkan 35% dari nilai rumah. Tawaran ini akhirnya diterima oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kompromi yang dianggap adil. Selain itu, Pihak B mengajukan permintaan untuk tetap memiliki mobil sebagai bagian dari bagiannya dalam pembagian harta bersama.

Menanggapi permintaan tersebut, mediator mengusulkan agar mobil sepenuhnya menjadi hak Pihak A sebagai bentuk kompensasi atas biaya mut'ah dan iddah. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa mobil awalnya dibeli oleh Pihak A, meskipun terdaftar atas nama Pihak B. Dengan adanya penyelesaian ini, mediator berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan secara signifikan. Kesepakatan ini juga memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara damai dan dapat diterima oleh masing-masing pihak tanpa perlu melibatkan jalur hukum yang lebih kompleks.

Untuk memastikan keberlanjutan dari kesepakatan yang telah dicapai, mediator menyusun dokumen tertulis yang berisi perjanjian resmi antara Pihak A dan Pihak B. Dokumen ini tidak hanya mencakup pembagian harta bersama, tetapi juga menetapkan ketentuan tambahan, seperti hak asuh anak dan jadwal kunjungan. Kesepakatan ini kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh mediator dan tokoh masyarakat setempat, guna memastikan keabsahan serta menghindari kemungkinan munculnya konflik baru di masa depan. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan kedua belah pihak dapat menjalani kehidupan masing-masing secara lebih damai serta tetap menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan bersama, terutama bagi anak-anak mereka.

3. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Harta Gono Gini)

Saat terjadi sengketa harta bersama, ada dua mekanisme penyelesaian yaitu melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*) dan melalui jalur diluar lembaga peradilan (*non-litigasi*). Mekanisme non-litigasi diatur dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, Para Pihak diwajibkan menempuh jalur perdamaian dahulu. Oleh karena itu dalam Pembagian harta bersama, mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas alas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta dimaksud. Hal demikian diperlukan

untuk menentukan bagian masing-masing atas harta bersama yang dimiliki oleh pasangan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.¹²

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian, tokoh agama sering berperan sebagai mediator yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara damai. Peran ini memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif, tetapi juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan

a. Kelebihan Peran Tokoh Agama sebagai Mediator.

Beberapa kelebihan tokoh agama sebagai mediator; *Pertama*, Panduan Moral dan Etika. Tokoh agama umumnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada ajaran agama. Hal ini memungkinkan mereka memberikan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan dalam kerangka nilai-nilai spiritual yang memperkuat aspek keadilan dan keharmonisan.

Kedua, Pendekatan Damai dan Rekonsiliatif. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama cenderung menekankan pendekatan damai dan rekonsiliatif, sehingga mengurangi potensi konflik berkepanjangan. Dalam banyak kasus, metode ini lebih efektif dibandingkan pendekatan litigasi yang dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan menekankan dialog dan musyawarah, tokoh agama dapat menciptakan ruang negosiasi yang kondusif bagi kedua belah pihak.

Ketiga, Pengaruh Spiritual dan Sosial. Sebagai figur yang dihormati dalam komunitas, tokoh agama memiliki otoritas moral yang dapat memengaruhi kedua belah pihak untuk mencapai kompromi yang lebih bijaksana. Perspektif spiritual yang mereka tawarkan juga dapat membantu meredakan emosi dan memperkuat motivasi untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Keempat, Efisiensi dalam Proses dan Biaya. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dapat menjadi alternatif yang lebih sederhana dan

¹² Sutrisno, "Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini," *Jurnal Hukum dan Keluarga*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 58.

ekonomis dibandingkan dengan proses hukum di pengadilan. Tidak adanya biaya perkara dan proses yang lebih fleksibel memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa beban administratif yang kompleks.

b. Kelemahan Peran Tokoh Agama sebagai Mediator

Demikian dengan kelemahan tokoh agama sebagai mediator, diantaranya; *Pertama*, Keterbatasan dalam Pemahaman Hukum. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman tokoh agama terhadap hukum perdata yang berlaku, terutama dalam aspek legal pembagian harta bersama. Ketidaksesuaian antara solusi yang ditawarkan dengan regulasi hukum positif dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Kedua, Potensi Ketidaknetralan. Dalam beberapa kasus, tokoh agama dapat memiliki kecenderungan untuk mendukung salah satu pihak berdasarkan interpretasi agama tertentu atau hubungan personal dengan pihak yang bersengketa. Ketidaknetralan ini dapat berakibat pada putusan yang kurang objektif dan menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak.

Ketiga Tidak Mengikat Secara Hukum. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi oleh tokoh agama tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak diresmikan melalui mekanisme legal yang sah, seperti pengesahan di pengadilan. Oleh karena itu, ada risiko bahwa salah satu pihak dapat mengingkari kesepakatan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. *Keempat*, Pendekatan Religius yang Tidak Selalu Relevan. Dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki pemahaman agama yang berbeda atau tidak terlalu berorientasi pada aspek spiritual, pendekatan yang terlalu berfokus pada ajaran agama dapat dirasakan kurang relevan atau bahkan bias. Hal ini dapat menghambat efektivitas mediasi jika solusi yang ditawarkan tidak memperhitungkan aspek hukum dan sosial secara lebih luas.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan tersebut, peran tokoh agama sebagai mediator tetap menjadi pilihan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, mediasi oleh tokoh agama idealnya dilakukan dengan

mempertimbangkan prinsip hukum yang berlaku serta menjamin netralitas dalam pengambilan keputusan.

Peran tokoh agama sebagai mediator bisa sangat efektif tergantung pada konteks kasus dan kesepakatan antara kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, batasan-batasan tertentu seperti keterkaitan dengan hukum perdata perlu diperhatikan agar solusi yang dihasilkan adil dan sah secara hukum.

C. Kesimpulan

Mediasi non-litigasi yang melibatkan tokoh agama dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini memiliki potensi besar sebagai alternatif penyelesaian konflik yang efektif, efisien, dan lebih bersifat damai dibandingkan dengan litigasi. Tokoh agama, dengan panduan moral dan pengaruh spiritualnya, mampu mendorong solusi yang adil dan bermartabat, membantu mengurangi ketegangan, serta menekankan pendekatan persuasif yang memungkinkan tercapainya kompromi. Namun, meskipun mediasi ini menghadirkan berbagai kelebihan, terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan dalam pengetahuan hukum perdata dan ketidakmengikatan hasil mediasi jika tidak disahkan secara hukum. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dan pemahaman hukum yang lebih komprehensif agar mediasi yang difasilitasi tokoh agama dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya adil menurut norma agama tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum negara, sehingga tercapai keadilan yang sah dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Referensi

- Agraida, Aisyah. "Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini Melalui Proses Mediasi (Studi Penetapan Nomor 436 / Pdt . G / 2016 / PA . Bji)." *IJBL: Indonesia Of Journal Business Law* 1, no. 2 (2022): 58–68. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1874>.
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Az-zahra, Indi Asqia, and Milhan. "Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah." *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 394–407.

- Habibah, Umi. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur” 4, no. 3 (2023): 646–61.
- Harisudin, Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 1–21. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240>.
- Indahsari, Veny Rizky, Sugijono, and Emi Zulaika. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi,” 2014, 1–12.
- Maisa. “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu.” *Journal Of Philosophy* 2, no. 2 (2021): 80–89.
- Saputra, Muhammad Alvin, A Robi, Tomy Erwansyah, Sri Jati, Ratna Sari, and Syeh Sarip Hidayatullah. “Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama The Urgency of Mediation in the Settlement of Joint Property Disputes.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803.
- Sriani, Endang. “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133–47. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.
- Zahid, Reza Ahmad, and Ahmad Badi. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Kediri).” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 270–87.